
ANALISIS DESKRIPTIF POTENSI DAERAH DAN TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA

Ade Syahputra¹, Mulyanto², Agustinus Suryantoro³, Lukman Hakim⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

*Email Korespondensi : adesyahputra.as53@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang gambaran potensi daerah dengan tingkat kemiskinan di setiap kota yang dianalisis. Semakin terpencil suatu daerah, semakin tinggi kemungkinan terjadinya kemiskinan. Selain itu, dominasi potensi pariwisata di Sumut menjelaskan bahwa semua daerah yang memiliki destinasi wisata cenderung memiliki potensi kemiskinan yang lebih rendah. Tidak hanya itu, kawasan yang menjadi penghubung daya tarik wisata juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di kawasan tersebut.

Kata Kunci: Kemiskinan; Potensi Daerah; Ekonomi Regional; Keuangan Daerah.

Abstract

This article discusses the description of the regional potential with the poverty level in each analyzed city. The more remote an area, the higher the probability of poverty. In addition, the dominance of tourism potential in North Sumatra has explained that all regions that have tourist destinations tend to have lower poverty potential. Not only that, the area that is a link to tourist attractions also has an impact on the welfare of the community and reduces the level of poverty in the area.

Keywords: Poverty; Regional Potential; Regional Economy; Regional Finance.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih dianggap sebagai problem di berbagai negara di dunia, karena itu “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan berkelanjutan merupakan tantangan pembangunan yang utama bagi banyak negara berkembang (Nwajiuba et al, 2012). Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia selalu mengalami peningkatan, namun kemiskinan di negara ini juga masih ada dan tidak mengalami penurunan yang cepat dan signifikan. Tercatat pada data Badan Pusat Statistik Indonesia persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69 persen, turun menjadi 6,56 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85 persen, turun menjadi 12,60 persen pada September 2019. Dibanding Maret 2019, jumlah penduduk miskin September 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 137 ribu orang (dari 9,99 juta orang pada Maret 2019 menjadi 9,86 juta orang pada September 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 221,8 ribu orang (dari 15,15 juta orang pada Maret 2019 menjadi 14,93 juta orang pada September 2019).

Garis Kemiskinan pada September 2019 tercatat sebesar Rp. 440.538,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 324.911,- (73,75 %) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp115.627,- (26,25%). Pada September 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan. Dari 33 provinsi di Indonesia, hanya satu provinsi yang mengalami kenaikan persentase kemiskinan yaitu Maluku Utara dengan kenaikan 0,14 poin dan 6 provinsi yang mengalami penurunan persentase kemiskinan tertinggi, yaitu Papua (0,98 poin), NTB (0,68 poin), Papua Barat (0,66 poin), NTT (0,47 poin), Bengkulu (0,32 poin), dan Lampung (0,32 poin).

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang tingkat kemiskinannya berada dibawah rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu 8,63% dari 9,22%. Angka kemiskinan di Sumatera Utara secara umum terjadi fluktuasi naik dan turun dalam jumlah maupun persentase pada periode 2012-2020. Berdasarkan data statistik tercatat pada Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin sebanyak 1 283,29 ribu jiwa atau sebesar 8,75 persen pada Maret 2020, terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 60,57 ribu jiwa pada periode Maret 2020 hingga Maret 2021, dengan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,26 poin. Dibandingkan dengan keadaan semester lalu pada September 2020, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.356,72 ribu jiwa dengan persentase 9,14 persen, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebanyak 12,86 ribu jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,13 poin. Kemiskinan tertinggi berada pada kota Gunungsitoli yang mencapai angka 16,41% pada tahun 2020. Angka tersebut terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 30,85% penduduk miskin di Gunungsitoli. Hampir 50% penurunan kemiskinan dari tahun 2012-2020. Proses penurunan tersebut tentu sangat prestatif. Kota Tanjungbalai adalah urutan kedua kota yang memiliki kemiskinan tertinggi. Tercatat tingkat kemiskinan menurun dari 14,04% pada tahun 2019 menjadi 13,33% pada tahun 2020. Walaupun sempat mengalami kenaikan kemiskinan di tahun 2015 dengan angka 15,08 dari 14,02% di tahun 2014, namun pada tahun selanjutnya terus mengalami penurunan yang cukup baik walaupun cenderung landai atau lambat dibanding dengan penurunan di Kota Gunungsitoli.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa, sekitar 47 triliun. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian berada pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, yaitu: Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang

Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padangsidempuan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi. Adapun waktu yang digunakan pada penelitaian adalah tahun 2014-2019. Dari ke 33 kabupaten/kota tersebut selanjutnya difokuskan pada analisis di kota madya dengan jumlah 8 kota. Adapun 8 kota tersebut adalah Kota Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padangsidempuan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data panel. Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi yakni pengumpulan data dengan mencatat data yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu serta menyalin dokumen-dokumen yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Laporan APBD Provinsi Sumatera Utara. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Laporan APBD masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2019 yang diambil dari website kementerian keuangan <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id>.
2. Laporan BPS Sumatera Utara terkait jumlah orang miskin di Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2014-2019 yang diambil dari website www.bps.go.id.

Analisis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif spasial. Analisis spasial adalah teknik/proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika matematis dalam rangka menemukan hubungan atau pola yang terdapat diantara unsur-unsur spasial. Pada analisis ini, akan menggunakan analisis dengan **Geographic Information System** (GIS) untuk melihat peta tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil yang dapat dilihat adalah peta persebaran kemiskinan di Sumatera Utara. Dari peta ini, kita dapat melihat secara langsung dan jelas, pola persebaran kemiskinan baik, menyebar berkumpul, atau membentuk alur. Pada peta yang dihasilkan dari alat analisis tersebut juga memperlihatkan indikator potensi apa saja yang mungkin mampu bersinggungan atau saling mempengaruhi dengan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

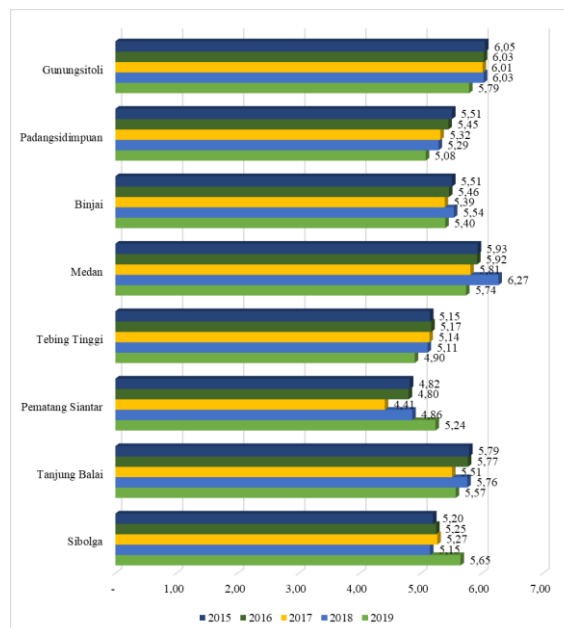
Sumatra Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatra. Provinsi ini beribu kota di Medan. Wilayah yang berada diantara 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur ini memiliki luas wilayah mencapai 71.680,68 Km². Memiliki 25 wilayah kabupaten dan 8 wilayah kota, 693 wilayah kelurahan dan 5.419 wilayah pedesaan, Sumatera Utara dihuni oleh 7.284.556 jiwa penduduk perkotaan dan 7.277.993 penduduk pedesaan, dengan total penduduk mencapai 14.562.549 jiwa (BPS Sumatera Utara, 2020).

Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara

PDRB merupakan salah satu dari neraca wilayah yang metode penghitungannya dapat menggunakan tiga macam pendekatan yaitu: metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Secara teori penghitungan PDRB dengan menggunakan ketiga metode tersebut akan menghasilkan nilai yang sama. Pada metode dengan pendekatan produksi, PDRB merupakan penjumlahan Nilai Tambah Bruto (NTB) dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit kegiatan ekonomi di suatu wilayah/region tertentu pada satu periode waktu tertentu. NTB dihitung dengan mengeluarkan komponen biaya (input antara) dari output. Output adalah nilai seluruh barang dan jasa hasil proses produksi. Secara teknis, output suatu jenis komoditas adalah hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan harga/tarif jual per unit barang, dimana harga yang dimaksud merupakan harga pada tingkat produsen. Biaya antara merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Sifat spesifik dari biaya antara yang membedakan dengan pembentukan modal adalah usia pakai/manfaat

yang pendek, habis dalam satu periode produksi, biasanya tidak lebih dari satu tahun. Dengan metode ini diperoleh gambaran mengenai PDRB dari sisi penawaran.

Berdasarkan metode pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan penjumlahan dari komponen-komponen pengeluaran yaitu : (1) konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba; (2) konsumsi pemerintah; (3) pembentukan modal tetap bruto; dan (4) selisih ekspor impor. Metode pengeluaran disebut juga dengan metode penggunaan yang mencerminkan PDRB dari sisi permintaan. Dengan metode pendekatan pendapatan, PDRB merupakan penjumlahan dari balas jasa faktor-faktor produksi, yaitu, (1) upah/gaji; (2) surplus usaha; (3) penyusutan/amortisasi dan (4) pajak tak langsung neto. Empat komponen ini juga biasa disebut sebagai biaya/input primer. Pemilihan metode penghitungan sangat bergantung pada ketersediaan data pendukung. Rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu region pada periode waktu tertentu dicerminkan oleh pendapatan per kapita, yaitu pendapatan regional dibagi jumlah penduduk. Karena keterbatasan data, indikator pendapatan regional belum dapat dihitung sehingga digunakan pendekatan PDRB per kapita. Langkah seperti ini lazim dilakukan ketika data-data pendukung seperti nilai penyusutan dan pajak tak langsung neto tidak mudah diperoleh di tingkat kabupaten/kota. Gubernur Sumatera Utara dalam SK Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2019 menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2020 sebesar Rp 2.499.423. UMP Sumatera Utara naik 8,51% dari angka UMP 2020. Dasar penetapan UMP 2020 sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. Angka upah ini cukup tinggi dibanding provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Ketika melihat pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang berada dibawah Kota Gunungsitoli memang cukup membingungkan, karena kota ini adalah pusat dari pemerintahan provinsi. Secara tingkat pendidikan, infrastruktur, kesehatan maupun yang lainnya tentu Kota Medan lebih baik dibanding dengan kota-kota lainnya. Namun, angka 5,74% di tahun 2019 masih dapat dikatakan tinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Daerah terendah adalah kota Tebing Tinggi yang hanya mencapai pertumbuhan 4,9% ditahun 2019. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,11%. Hingga meletakkankota ini dibawah Kota Pematang Siantar yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,86% ditahun 2018, menjadi 5,24% di tahun 2019.



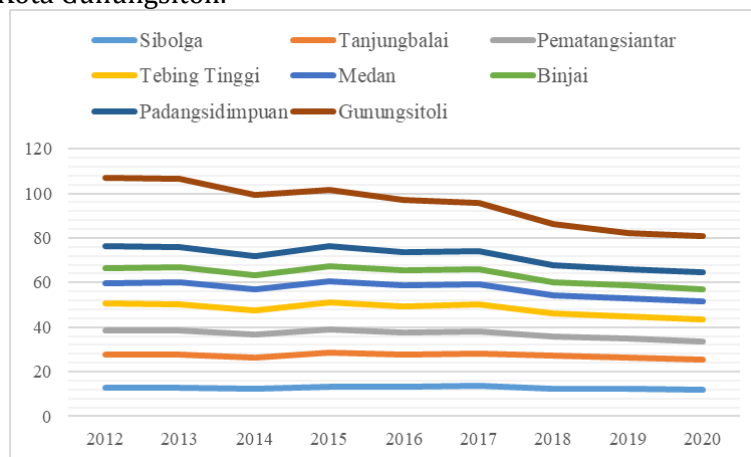
Gambar 4. 1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

Profil Kemiskinan pada Kota di Sumatera Utara

Angka kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut) secara umum terjadi fluktuasi naik dan turun dalam jumlah maupun persentase pada periode 2012-2020. Berdasarkan data statistik tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1 283,29 ribu jiwa atau sebesar 8,75 persen pada Maret 2020, terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 60,57 ribu jiwa pada periode Maret 2020 hingga Maret 2021, dengan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,26 poin.

Jika dibandingkan dengan keadaan semester lalu pada September 2020, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.356,72 ribu jiwa dengan persentase 9,14 persen, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebanyak 12,86 ribu jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,13 poin. Jika ditelisik tingkat kemiskinan pada kota-kota di Sumatera Utara juga terlihat mengalami fluktuasi. Namun demikian secara umum tingkat kemiskinan di setiap kota Sumatera Utara mengalami penurunan secara persentase. Kemiskinan tertinggi berada pada kota Gunungsitoli yang mencapai angka 16,41% pada tahun 2020. Angka tersebut terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 30,85% penduduk miskin di Gunungsitoli. Hampir 50% penurunan kemiskinan dari tahun 2012-2020. Proses penurunan tersebut tentu sangat prestatif.

Kota Tanjungbalai adalah urutan kedua kota yang memiliki kemiskinan tertinggi. Tercatat tingkat kemiskinan menurun dari 14,04% pada tahun 2019 menjadi 13,33% pada tahun 2020. Walaupun sempat mengalami kenaikan kemiskinan di tahun 2015 dengan angka 15,08 dari 14,02% di tahun 2014, namun pada tahun selanjutnya terus mengalami penurunan yang cukup baik walaupun cenderung landai atau lambat dibanding dengan penurunan di Kota Gunungsitoli.



Gambar 4.2. Tingkat Kemiskinan pada Kota di Sumatera Utara 2019

Kota Binjai adalah kota yang memiliki kemiskinan terendah dibanding kota lainnya. Pada tahun 2020 kemiskinan kota Binjai diangka 5,71% lebih kecil dibanding kota lainnya. Walaupun angka tersebut meningkat dari tahun 2019 yang mencapai angka 5,66%. Secara umum, dari tahun 2012 kemiskinan di Kota Binjai terus mengalami penurunan yang cukup lambat. Kelambatan penurunan ini masih cukup baik karena trend nya adalah menurun.

Profil Pendidikan Sumatera Utara Angka Partisipasi Murni di Sumatera Utara

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang besesuaian. Angka ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan

seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Nilai APM berkisar antara 0-100, yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Berikut adalah uraian data APM di Sumatera Utara pada tahun 2019:

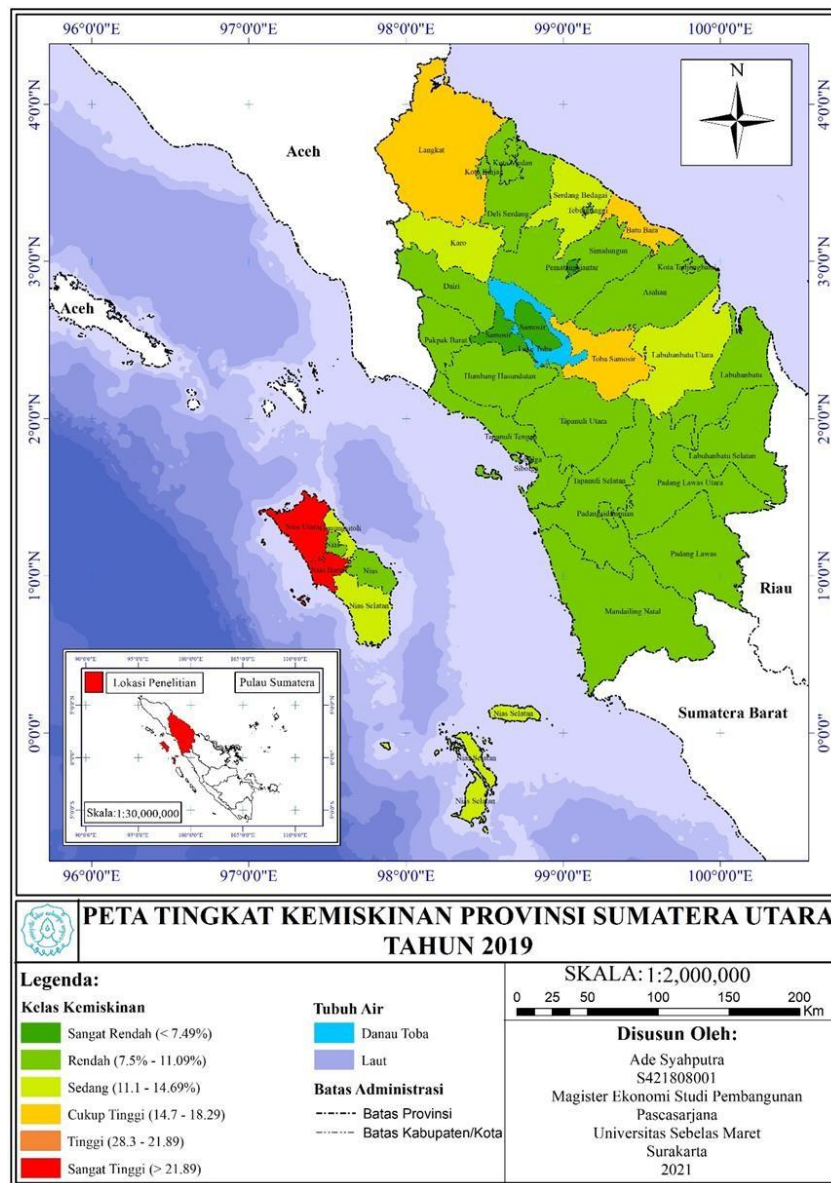
Kota Tanjung Balai	98,38	81,82	71,75	10,04
Kota Pematang Siantar	99,58	81,55	75,78	23,11
Kota Tebing Tinggi	98,04	82,62	67,17	11,81
Kota Medan	93,47	80	61,43	33,54
Kota Binjai	99,26	83,43	72,62	20,4
Kota Padangsidempuan	99,64	84,38	77,46	29,64
Kota Gunungsitoli	98,83	82,87	75,07	19,75
Sumatera Utara	97,67	80,26	67,53	18,76
- Pedesaan	96,6	80,39	67,63	23,6
- Perkotaan	98,8	80,12	67,42	11,8

Source : BPS-Nasional Sosio Economic Survey 2019

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa Angka Partisipasi Murni di Sumatera Utara untuk tingkat pendidikan SD 97,67, angka tersebut adalah angka terbesar karena memang, pendidikan Sekolah Dasar lebih banyak menampung anak untuk bersekolah karena lebih mudah terjangkau baik fasilitas maupun biaya. Selanjutnya, hanya sekitar 67,53 saja, anak yang mampu merasakan fasilitas pendidikan SMA. Angka tersebut semakin menurun ketika memasuki jenjang PT, yang hanya mencapai angka 18,76. Fenomena diatas menandakan bahwa, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah konsumen dari pendidikan tersebut. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang memaksa untuk memilih pekerjaan dibanding pendidikan. Pada sisi lain, semakin tinggi jenjang pendidikan, proses seleksi untuk memasuki jenjang pendidikan tersebut juga semakin kompleks dan semakin berat. Asumsi lainnya adalah, akses transportasi dan informasi atas jenjang pendidikan juga sangat terbatas apalagi untuk masyarakat pedesaan.

Analisis Spasial

Bagian ini akan membahas analisis deskripsi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara akan dibedakan oleh warna pada peta. Analisis ini membagi enam (6) pembagian warna pada peta, merah untuk kemiskinan sangat tinggi, merah muda untuk kemiskinan tinggi, oranye untuk kemiskinan cukup tinggi, kuning untuk kemiskinan sedang, hijau muda untuk kemiskinan rendah dan hijau tua untuk kemiskinan sangat rendah. Berikut adalah Gambar 4.1 Peta Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2019, yang akan menjelaskan tentang gambaran umum persebaran kemiskinan di Sumatera Utara.



Gambar 4. 3. Peta Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019

Berdasarkan peta diatas, terlihat bahwa kemiskinan tertinggi berada pada kabupaten Nias. Kemiskinan pada kabupaten tersebut dapat dilihat dari warna merah pada peta. Pulau Nias termasuk dalam provinsi Sumatera Utara, letaknya yang berada di luar pulau Sumatera menjadi salah satu penyebab kabupaten yang berada di pulau tersebut menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Terdapat 4 kabupaten yang berada dalam wilayah pulau Nias, dimana 1 kabupaten memiliki kemiskinan yang rendah yaitu kabupaten Nias, dan tingkat kemiskinan sedang berada pada kabupaten Nias Selatan, dan 2 kabupaten sisanya memiliki kemiskinan yang sangat tinggi yaitu 24,99% kabupaten Nias Barat dan 25,51% kabupaten Nias Utara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin jauhnya suatu daerah dari pusat kota provinsi maka tingkat kemiskinannya cenderung semakin tinggi. Selain itu, semakin jauhnya jarak dan terpisahnya suatu wilayah dari wilayah lain, maka kemiskinan pada daerah tersebut cenderung tinggi.

Kemiskinan yang tergolong tinggi ditunjukkan oleh warna oranye pada peta terletak pada 3 kabupaten. Kabupaten Batubara tergolong pada kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu 16,23%. Selanjutnya, kabupaten Langkat yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 15,94% dan tergolong pada kemiskinan yang cukup tinggi di Sumatera Utara. Terakhir adalah kabupaten Toba Samosir yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 16,45% dan juga termasuk dalam kategori kemiskinan yang cukup tinggi. Jika melihat persebaran wilayah pada tingkat kemiskinan yang cukup tinggi tersebut, terlihat bahwa ketiga kabupaten tersebut tidak berada pada wilayah yang saling berdekatan. Setidaknya dipisahkan oleh satu sampai dua kabupaten. Namun demikian, jika melihat letak geografis dan kontur tanahnya, ketiga kabupaten tersebut terletak pada wilayah pesisir, dua diantaranya pesisir pantai (Kabupaten Langkat dan Batubara) dan kabupaten Toba Samosir yang langsung berbatasan pada Danau Toba. Ketidak mampuan masyarakat dalam memanfaatkan atau mengembangkan potensi wilayahnya mungkin menjadi penyebab ke tiga daerah tersebut masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Selain itu, sulitnya akses jalan karena kontur wilayah yang cenderung lebih sulit untuk pembangunan fasilitas transportasi, juga dapat menjadi penyebab wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibanding wilayah sekitarnya.

Tingkat kemiskinan yang tergolong sedang berada pada 5 wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Satu dari kelima wilayah tersebut adalah daerah yang tergolong sebagai salah satu kota di Sumatera Utara, daerah tersebut adalah Kota Gunungsitoli dengan tingkat kemiskinan sebesar 14.04%. Kota Gunung Sitoli terletak pada bagian luar pulau Sumatera tepatnya di pulau Nias. Wajar jika kota ini berada pada kemiskinan yang sedang, karena akses yang cukup sulit untuk mencapai kota tersebut dibanding dengan kota lainnya. Pada kategori kemiskinan sedang ini, terdapat 2 daerah yang berada terpisah dengan pulau Sumatera, selain Gunungsitoli terdapat Kabupaten Nias selatan yang memiliki tingkat kemiskinan sedang dan berada didaerah cukup terpencil. Selanjutnya, terdapat 3 daerah yang menyatu dengan pulau Sumatera namun, berada pada batas daerah yang memiliki geografis dekat daerah pantai dan pegunungan, yaitu Kabupaten Karo, Serdang Bedagai, dan Labuhanbatu Utara. Cukup menjadi sorotan adalah Kabupaten Serdang Bedagai dan Labuhanbatu Utara, karena letak geografisnya berada pada akses jalan utama dan jarak yang cukup dekat dengan pusat ibukota provinsi Sumatera Utara. Kedua kabupaten tersebut seharusnya dapat menjadi perhatian khusus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan rendah mayoritas ditempati oleh sebagian besar kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Terdapat 20 kabupaten dan kota yang berada pada tingkat kemiskinan rendah, 5 diantaranya adalah kota dan 15 diantaranya adalah kabupaten. Kota yang termasuk pada tingkat kemiskinan rendah adalah Kota Binjai, Medan, Padangsidempuan, Tanjungbalai dan Tebing Tinggi dengan tingkat kemiskinan antara 7,5%-11,9%. Selanjutnya 15 kabupaten yaitu, Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasudutan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Dari 15 kabupaten tersebut hanya 1 kabupaten yang letaknya terpisah dari pulau Sumatera yaitu Kabupaten Nias. Meskipun kabupaten ini berada diluar pulau dan cukup terpencil namun tingkat kemiskinannya tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh, kabupaten ini terkenal dengan wisata kebudayaannya, sehingga dengan adanya wisata tersebut mampu menekan kemiskinan di kabupaten Nias.

Tingkat kemiskinan sangat rendah diisi oleh 2 kota dan 1 kabupaten. Kedua kota tersebut adalah kota Pematangsiantar dan Sibolga. Kedua kota ini adalah kota yang cukup menjadi sorotan dalam pembahasan kali ini. Sebab kedua kota tersebut merupakan dua kota yang memiliki perbedaan namun saling menungjang dari sisi jenis mutualisme. Kota

Sibolga terkenal dengan wisata pantainya yang sangat indah. Letak kota Sibolga cukup jauh dari pusat ibu kota provinsi, namun karena potensi wisata yang sangat tinggi, kota ini mampu meletakkan daerahnya pada tingkat kemiskinan yang tergolong sangat rendah. Selanjutnya, Kota Pematangsiantar merupakan kota yang terletak pada jalan lintas penghubung ibu kota provinsi ke daerah lainnya. Karena letaknya yang termasuk pada daerah penghubung maka ekonomi kota ini cukup baik. Kota Pematangsiantar khususnya menjadi daerah penghubung jika ingin menikmati wisata Parapat, Danau Toba dan Samosir. Karena letaknya yang cukup strategis walaupun tidak berbatasan langsung dengan daerah wisata tersebut, namun kota Pematangsiantar menjadi tempat untuk singgah beristirahatnya para wisatawan. Efek dari penghubung dan tempat istirahat wisatawan maka kota ini menjadi salah satu daerah yang memiliki industri wisata dan oleh-oleh yang cukup berkembang pesat. Satu daerah kabupaten lainnya adalah kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir adalah kabupaten dimana *icon* daerah Sumatera Utara berada yaitu Danau Toba. Sangat jelas jika kabupaten Samosir menjadi kabupaten yang paling rendah kemiskinannya dibanding kabupaten lainnya. Pusat ekonomi dengan sendirinya terbentuk akibat dari wisata yang ada di kabupaten ini. Berdasarkan hasil analisis spasial diatas dapat kita lihat bahwa, posisi daerah yang berbatasan langsung dengan daerah wisata. Tentu ini menjadi perhatian khusus untuk penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Letak geografis suatu daerah mampu menggambarkan bagaimana kemiskinan pada daerah tersebut. Semakin terpencil suatu daerah, maka kemungkinan tingkat kemiskinannya semakin tinggi. Selain itu, dominasi pada potensi wisata di Sumatera Utara telah menjelaskan bahwa seluruh daerah yang memiliki destinasi wisata cenderung lebih memiliki potensi kemiskinannya semakin rendah. Bukan hanya itu, daerah yang menjadi penghubung ketempat wisata juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Namun memang tetap menjadi catatan pada kabupaten Toba Samosir yang merupakan salah satu daerah yang berada dekat pada daerah wisata namun memiliki kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan, daerah tersebut belum menjadi destinasi wisata meskipun terletak pada.

REFERENSI

- Anderson, Edward., d'Orey, Maria Ana Jalles., Duvendack, Maren., Esposito, Lucio. 2018. Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis. *World Development* 103 (2018) 60–71. Elsevier
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Konsep dan Ketimpangan Kemiskinan*. Diakses 31 Oktober 2017, dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/23>
- Dankumo, Ishak, Bani, dan Hamza. 2019. The Relationship between Public Expenditure, Corruption and Poverty in Nigeria. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 11, No. 1
- Darmantyo, Dimas Ari. 2016. Analisa Tentang Dampak Alokasi Anggaran 'Kabupaten Apbd A Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2006-2009. *The Management Journal Of Binaniaga* Vol. 01, No. 1, 2016. Issn: 2527 – 4317

- Fithri dan Kaluge. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15, No. 2.*Hal: 129-136.
- Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C. 2009. *Essentials of Econometrics*. Eds: 4. The McGraw-Hill Companies: Boston Burr Ridge
- Hakim, Lukman, & Zuber, Ahmad. 2008. Dimensi Geografis dan Pengentasan Kemiskinan Pedesaan. *Media Ekonomi*.
- Has, Nur Sofyan. 2017. *Pro Poor Budget: A Study On The Symbolic Interaction Of Budget Actors In The Pangkajene And Island Local Government*. Tesis. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Hukom, Alexandra. 2015. Effect Of Capital Expenditures, Economic Growth And Poverty On Human Development In Central Kalimantan. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 6, Issue 6. Ver. IV (Nov. - Dec. 2015), PP 19-27
- Jamco, Muhamad Taher. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Maluku Tenggara. *BIOLOGI SEL*. Vol. 4, No. 1, Eds:jan-jun 2015, Issn. 2252-858x. Hal: 74-82.
- Jaya, I. G. N. M., & N. Sunengsih. 2009. Kajian Analisis Regresi dengan Data Panel. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Kaligis, Ezra. Engka, Daisy S.M. Tolosang, Krest D. 2017. Effect Of Capital Expenditure On Poverty In North Minahasa Through Economic Growth As Intervening Variables. *Jurnal Berkalallmiah Efisiensi*. Volume 17 No. 02 Tahun 2017.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Lindiasari dan Ramadhani. 2019. Efektivitas Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan Ditengah Perlambatan Ekonomi Indonesia dengan Pendekatan Nonparametrik. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 5, No. 1, Hal: 10-34.
- Lucky, Dihan. 2013. Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol.4, No.19, 2013
- Mawardi, Sulton dan Sumarto, 2003, Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus: Pro-poor Budgeting), Bahan Pelatihan SMERU